

**LAPORAN TRIWULAN I
CAPAIAN PENETAPAN KINERJA (P K)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesulitan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ukuran keberhasilan instansi Pemerintah selama ini masih berorientasi pada output dan belum berorientasi pada outcome.

Perencanaan Kinerja adalah suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Penetapan Kinerja (PK) merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja sesuai yang direncanakan. Penetapan Kinerja harus memuat IKU dan pagu anggaran yang tersedia. Penetapan Kinerja harus menggambarkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan yang meliputi: (1) Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian; (2) Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral; (3) Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian; (4) Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kementerian Pertanian; (5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; (6) Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik; (7) Penyelenggaraan

Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian, (8) Perizinan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian.

Sejalan dengan reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai tahun 2010 setiap Kementerian/Lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan amanat pengembangan e-performance, serta mengacu pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Evaluasi Sakip Kementerian Pertanian Tahun 2013, juga meninsyaratkan bahwa Penetapan Kinerja harus di monitor/evaluasi secara berkala (Triwulan).

1.2. Tujuan

Guna melihat sejauh mana tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan Triwulan 1 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh lingkup Sekretariat Jenderal kementerian Petanian.

II. Hasil Laporan Evaluasi Triwulan I Penetapan Kinerja (PK) Lingkup Sekretariat Jenderal.

II.1. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2014, sesuai dengan Sasaran Strategis yaitu Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, serta terlaksananya pemasyarakatan program dan komunikasi pembangunan pertanian dan Indikator Kinerja adalah : (1) Meningkatnya pemberitaan positif . Biro Umum dan Hubungan Masyarakat telah menetapkan targetnya 7% .

Dari hasil laporan Triwulan I yang baru terlisasi 2%. Antara lain dari indikator (1) Yang terdiri dari Pemberitaan positif di media cetak cukup banyak dan isu negatif yang ada di media massa berupa dampak perubahan iklim yang mengakibatkan produksi pangan menurun/gagal panen. Berita tersebut telah ditindak lanjuti dengan Respon isu,advertorial di media cetak, press release,dan press conference, serta sosialisasi kegiatan-kegiatan yang menciptakan citra positif di masyarakat.

(2) Layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi dengan menetapkan targetnya 60 %

Dari hasil laporan Triwulan 1 Pada Indikator (2), yaitu persiapan /dalam proses tender.

II.2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sasaran Strategis dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) Indikator yaitu :

(1). Indeks Penerapan Nilai –nilai Budaya kerja dengan target 72. Hasil laporan Triwulan I yang baru terlaksanakan progres (kemajuan pelaksanaan) 20% dan kegiatan ini direncanakan akan selesai pada bulan agustus 2014.

(2). Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan dan target penyelesaian 80%, dari hasil laporan Triwulan 1 baru kemajuan pelaksanaan 20%, dengan (a) banyaknya permasalahan yang dihadapi yaitu dalam cara perhitungan tunjangan kinerja dan akan ditindak lanjuti dalam waktu

dekat dengan peraturan perubahan Permentan No.68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian. Dan (b) Permasalahannya dengan keinginan pegawai untuk memperoleh tunjangan kinerja yang lebih tinggi, sementara pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Kemudian di tindak lanjuti dengan Penetapan mekanisme perubahan data pemangku jabatan.

- (3). Kualitas layanan kepegawaian tepat waktu dan target selesainya 80%, Pada Laporan triwulan 1 Kemajuan pelaksanaan sudah 45% karena kegiatannya hanya berupa Fasilitas Administrasi Kepegawaian Satu Atap, dan untuk proses Kenaikan pangkat, pensiunan dan Pegawai baru.

II.3. Biro Keuangan dan Perlengkapan

Dari Sasaran Strategis Biro Keuangan dan Perlengkapan, yaitu Tentang Pengelolaan keuangan dan Perlengkapan secara Akuntabel dan Transparan serta Pengelolaan kearsipan secara tertib, dengan 2 Indikator antara lain:

- (1). Laporan Keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dengan target 95% hasil laporan evaluasi Triwulan 1 yang baru terealisasi 25% yaitu dalam proses pembahasan dan koreksian dari Eselon 1 dengan adanya temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2013 untuk diakomodir dalam laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 Audited.
- (2). Arsip Dinamis yang dapat disediakan sebagai alat bukti yang sah, dan target penyelesaiannya 95% dari hasil laporan Triwulan 1 baru terealisasi 25%, dengan melakukan Penyempurnaan hasil Pembahasan pertama Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian.

II.4. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Sasaran Strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, yaitu Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas data Pertanian, dengan 2 Indikator

- (1) Akses Pengguna terhadap Layanan data dan Informasi pertanian (google analytics) dengan target 750.000 Hits ,baru terealisasi 175.000 Hits pada Triwulan 1, dilihat dari hasil user mengakses web kementan sebanyak 211.649 Hits atau sama dengan 121% ini melebihi target yang direncanakan pada Triwulan 1 dengan kegiatan 03 yang di ukur antara lain:
- (a) Data yang selalu di update di dalam database antara lain BDSPP (Basis Data Statistik Pertanian) dan EXIM (Export Import)
 - (b) Publikasi statistik yang diterbitkan secara rutin outlook sub sector, (data yang dianalisis per sector) dan newsletter (berita aktual)
 - (c) Layanan informasi Teknologi Kementerian Pertanian berbasis Informasi Teknologi
- (2) Kepuasan Pengguna layanan Pusdatin dengan target 70%. Hasil laporan Triwulan 1 Progresnya baru 10% sudah dilaksanakan baru pada tahap koordinasi dengan tim pelaksana survei, untuk menyusun kuesioner , penetapan lokasi survei dan metodologinya. Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan Pusdatin baik di Pusat maupun Daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Layanan Data dan pada layanan data dibagi menjadi 3 Indikator antara lain (a) Kualitas data (b) Pelayanan data dan (c) Produk Publikasi.
- Variabel yang akan diukur merupakan produk-produk pusdatin yang ada pada kegiatan antara lain di 01 yaitu : Penyusunan, Pengkajian dan pada kegiatan 02 yaitu Pengembangan Data, Pembinaan, informasi Pemanfaatan dan Analisis Data. Permasalahannya untuk bisa melihat Capaian Indikator Kinerja baru bisa terlihat pada Triwulan IV setelah dilakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dan akan ditindak lanjuti dengan dilaksanakan survei secepatnya.

II.5 Pusat Kerja Sama Luar Negeri (PKLN).

Sasaran Strategis dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah Meningkatnya Intensitas dan Kualitas kerjasama luar negeri di bidang Pertanian melalui forum Bilateral, Regional dan Multilateral, dan Indikator Jumlah kegiatan kerjasama luar negeri yang di tindak lanjuti dengan target 75. Pada Triwulan 1 realisasinya baru 15, telah melakukan Koordinasi dengan Instansi lain

dan upaya percepatan kegiatan dan Permasalahan dalam proses pertanggung jawaban keuangan yang sering terkendala. Telah ditindak lanjuti dengan melakukan revisi/ perubahan pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan melaksanakan Workshop laporan keuangan di tingkat satker.

II.6 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Sasaran Strategis dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan Pertanian, dengan Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan 2 Indikator yaitu :

- (1) Surat izin dan rekomendasi bidang pertanian yang diterbitkan tepat waktu dan Indikator ini merupakan Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 3200 dari laporan Triwulan 1 baru terealisasi 271. (8,47%).
- (2) Pemberian hak perlindungan varietas tanaman, Indikator ini juga merupakan Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 50. Pada laporan Triwulan 1 belum adanya realisasi , permasalahannya pada pengujian varietas yang akan disidangkan pada rapat komisi PVT, belum ada persetujuan, juga tidak ada tindak lanjutnya.

II.7 Biro Perencanaan

Sasaran Strategis dari Biro Perencanaan, dengan membuat Dokumen Perencanaan, Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik dan 6 Indikator (diantaranya 5 Indikator dengan Dokumen Perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan target 63% dan 1 Indikator Nilai Sakip Sekretariat Jenderal dengan target 75%) dari 5 indikator antara lain Yaitu :

- (1). Jumlah dokumen penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan, yang nantinya akan menghasilkan target 6 dokumen. Pada laporan Triwulan 1 baru diselesaikan laporan Sosialisasi Aplikasi E-Proposal untuk Perencanaan Tahun 2015.

- (2). Jumlah dokumen/ laporan penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran, akan menghasilkan target 21 dokumen/laporan. Pada laporan Triwulan 1 baru terealisasi Laporan Apresiasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Setjen.
- (3). Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro, menghasilkan target 20 laporan. Pada Triwulan 1 sudah dilaksanakan Workshop Aplikasi Monev 2014.
- (4). Jumlah laporan pelaksanaan kinerja, menghasilkan target 14 laporan dan pada Triwulan 1 baru final adalah laporan lakip, dan laporan lainnya menghasilkan secara berkala (Triwulan dan Bulanan) dan laporan finalnya di akhir tahun.
- (5) Nilai Sakip Sekretariat Jenderal, dengan target 1 laporan. Pada Triwulan 1 , belum ada realisasi karena masih menunggu hasil penilaian Itjen.

Permasalahan dari laporan Triwulan 1 Biro Perencanaan adalah , Belum adanya panduan pengukuran realisasi fisik, sehingga prosentase pencapaian fisik masih masih belum seragam di tingkat Biro Perencanaan, khususnya dan di tingkat kementerian pertanian secara umum.

Tindak lanjutnya adalah Biro Perencanaan dan semua Biro/Pusat Lingkup Setjen sedang membuat panduan pembobotan realisasi fisik. Triwulan II akan mulai diterapkan.

II.8 Biro Hukum dan Informasi Publik

Sasaran Strategis dari Biro Hukum dan Informasi Publik, dengan Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian, dengan 2 Indikator yaitu :

- (1). Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat diterbitkan (prolegtan) dengan target 30 dari laporan Triwulan I baru terealisasi 11 (27%).
- (2). Indeks layanan informasi publik bidang pertanian (nilai IKM), dengan target 81 hasil laporan Triwulan sudah terealisasi 81 (100%) yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian dan telah dilakukan penghitungan Monitoring Kepuasan Masyarakat dalam kecepatan waktu pemenuhan informasi publik tersebut.